

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian eksperimen dan pembahasan mengenai Penghindaran Pajak berdasarkan kondisi *Whistleblowing System* DJP dan ada atau tidaknya Literasi *Big Data Analytics* yang diberikan pada Mahasiswa S-1 Program Studi Akuntansi di Bandung, penulis mengambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh *Whistleblowing System* DJP terhadap Penghindaran Pajak. Artinya, responden (mahasiswa) yang dihadapkan dalam kondisi *whistleblowing system* DJP yang baik cenderung memiliki tingkat keputusan melakukan penghindaran pajak yang sama dengan responden yang dihadapkan dalam kondisi *whistleblowing system* DJP yang buruk. Kondisi *whistleblowing system* DJP yang tidak mempengaruhi responden untuk melaporkan pajak terutang nya sesuai dengan yang seharusnya mengindikasikan bahwa walaupun pihak DJP mengelola *whistleblowing system* DJP dengan baik, hal tersebut tidak menentukan seorang pembayar pajak akan menghindari tindakan penghindaran pajak.
2. Terdapat pengaruh Literasi *Big Data Analytics* terhadap Penghindaran Pajak. Artinya, responden (mahasiswa) yang diberikan literasi *big data analytics* memiliki kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah daripada responden yang tidak diberikan literasi *big data analytics*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa teknologi *big data* dan kemampuan menganalisis *big data* dalam bidang perpajakan memiliki peran yang penting dalam meminimalisasi penghindaran pajak di Kota Bandung. Dengan diberikan pemahaman atau literasi mengenai *big data analytics*, yang di dalamnya memuat informasi AEOI, diharapkan membuat Wajib Pajak lebih patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

3. Tidak terdapat pengaruh interaksi antara *whistleblowing system* DJP dan literasi *big data analytics*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keputusan responden pada kondisi *whistleblowing system* DJP dan literasi *big data analytics* tidak akan terpengaruhi satu sama lain. Responden tetap akan melakukan penghindaran pajak dalam kondisi *whistleblowing system* yang baik tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya literasi *big data analytics* yang diberikan. Selain itu, responden yang diberikan literasi *big data analytics* tetap akan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan yang seharusnya tanpa mempertimbangkan kondisi *whistleblowing system* DJP.
4. Tidak terdapat perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang mendapat Literasi *Big Data Analytics* dengan Mahasiswa yang tidak mendapat Literasi *Big Data Analytics* pada kondisi *Whistleblowing System* DJP yang baik. Artinya, responden (mahasiswa) yang dihadapkan dengan kondisi *whistleblowing system* DJP yang baik pada kondisi mendapatkan literasi *big data analytics* memiliki tingkat keputusan melakukan penghindaran pajak yang sama dengan responden yang dihadapkan dengan kondisi *whistleblowing system* DJP yang buruk. Hal ini mengindikasikan bahwa ada faktor yang menyebabkan responden menganggap bahwa *whistleblowing system* DJP yang baik sekalipun tidak mampu membuat mereka terdorong untuk membayar pajak terutangnya sesuai dengan yang seharusnya.
5. Tidak terdapat perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang mendapat Literasi *Big Data Analytics* dengan Mahasiswa yang tidak mendapat Literasi *Big Data Analytics* pada kondisi *Whistleblowing System* DJP yang buruk. Artinya, responden (mahasiswa) yang dihadapkan dengan kondisi *whistleblowing system* DJP yang baik pada kondisi tidak mendapatkan literasi *big data analytics* memiliki tingkat keputusan melakukan penghindaran pajak yang sama dengan responden yang dihadapkan dengan kondisi *whistleblowing system* DJP yang buruk. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa terdapat faktor yang menyebabkan responden tidak terpengaruh oleh kondisi *whistleblowing system* DJP, sehingga dalam kondisi buruk ataupun baik, tingkat keputusannya adalah sama. Begitu juga dengan literasi *big data analytics*.

6. Terdapat perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang baik dengan Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang buruk pada kondisi mendapat Literasi *Big Data Analytics*. Artinya, responden (mahasiswa) yang mendapatkan literasi *big data analytics* pada kondisi dihadapkan dengan *whistleblowing system* DJP yang baik memiliki tingkat keputusan melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan responden yang tidak mendapatkan literasi *big data analytics*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan diberikannya literasi *big data analytics* serta didorong dengan kondisi *whistleblowing system* DJP yang baik, maka niat responden dalam melakukan penghindaran pajak menjadi rendah, sehingga responden melaporkan PPh terutang sesuai dengan yang seharusnya.
7. Tidak terdapat perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang baik dengan Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang buruk pada kondisi tidak mendapat Literasi *Big Data Analytics*. Artinya, responden (mahasiswa) yang mendapatkan literasi *big data analytics* pada kondisi dihadapkan dengan *whistleblowing system* DJP yang buruk memiliki tingkat keputusan melakukan penghindaran pajak yang sama dibandingkan dengan responden yang tidak mendapatkan literasi *big data analytics*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan responden tidak merasa terancam dengan adanya literasi yang diberikan, sehingga kontrol terhadap hal tersebut menjadi kurang.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa penurunan keinginan responden untuk melakukan penghindaran pajak sudah cukup mampu diatasi dengan diberikan literasi *big data analytics*.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Hasil dari penelitian ini secara tidak langsung mampu memberikan beberapa implikasi bagi beberapa pihak yang terkait, yakni Direktorat Jenderal Pajak dan bagi Program Studi Akuntansi di universitas-universitas yang berada di Bandung, yakni; Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pasundan, Universitas Komputer Indonesia, Universitas Jenderal Achmad Yani, Telkom University, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Islam Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Pasundan, Universitas Widyatama, USB YPKP (Universitas Sangga Buana YPKP), dan STIE INABA.

1. *Whistleblowing system* DJP merupakan suatu alat yang digunakan sebagai sarana pelaporan atas tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun pada penelitian ini *whistleblowing system* DJP tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun tidak berarti *whistleblowing system* DJP tidak penting. Kinerja yang diberikan oleh fiskus yang melayani setiap pelapor harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan agar para Wajib Pajak semakin menaruh kepercayaan pada fiskus, sehingga Wajib Pajak tidak merasa sia-sia karena telah membayar pajak.
2. Literasi *big data analytics* menjadi suatu hal yang krusial untuk menumbuhkan kesadaran bagi para Wajib Pajak agar tidak melakukan penghindaran pajak, seperti menyembunyikan aset yang dimiliki di luar negeri, karena hal tersebut berkaitan dengan berlakunya *Automatic Exchange of Information* (AEOI), di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Program Studi Akuntansi UPI dan di universitas-universitas tersebut di atas dapat menyediakan mata kuliah yang menekankan pada pentingnya *big data analytics*, terutama pada bidang perpajakan. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan dalam menghindari kemungkinan adanya mahasiswa lulusan Program

Studi Akuntansi UPI yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Adapun cara yang dapat mendukung dalam pemberian pemahaman mengenai literasi *big data analytics*, ialah dengan mengadakan penyuluhan, seminar, dan atau dalam bentuk penyampaian lainnya. Cara tersebut dapat dilakukan oleh narasumber yang sesuai bidangnya, seperti oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya divisi yang terkait dengan teknologi.

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, di antaranya adalah:

1. Tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh *whistleblowing system* DJP terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan penulis dalam mengontrol responden secara maksimal. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, penulis memberikan rekomendasi agar mengontrol responden dengan lebih ketat dalam penelitian eksperimen.
2. Tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh interaksi antara *whistleblowing system* DJP dan literasi *big data analytics*. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan penulis dalam mengontrol responden secara maksimal. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, penulis memberikan rekomendasi agar mengontrol responden dengan lebih ketat dalam penelitian eksperimen, misalnya mengontrol secara langsung dalam proses eksperimen agar dapat memisahkan responden sesuai dengan kelas eksperimennya masing-masing.
3. Penelitian eksperimen ini menggunakan desain faktorial dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara daring sehingga eksperimen yang dilakukan dirasa kurang efektif. Penelitian yang memiliki desain penelitian berupa desain faktorial lebih membutuhkan suatu kontrol yang ketat terhadap responden penelitian di setiap kelasnya. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan desain faktorial lebih baik dilakukan secara luring agar dapat mengontrol responden dengan lebih baik.

4. Pemilihan mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini cukup berat karena memiliki *gap* yang terlalu jauh antara subjek dan objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian mengenai *whistleblowing system* DJP, literasi *big data analytics*, dan penghindaran pajak lebih baik dilakukan pada Wajib Pajak, sehingga kemungkinan responden memahami skenario yang diberikan saat penelitian berlangsung lebih besar karena seorang Wajib Pajak sudah memegang tanggung jawab untuk membayar pajak, berbeda dengan mahasiswa yang baru diberikan teori mengenai perpajakan.
5. Kurangnya studi pendahuluan mengenai paham atau tidaknya responden dengan literasi *big data analytics*. Penelitian ini membandingkan responden yang diberikan literasi *big data analytics* dengan yang tidak diberikan. Oleh karena penggunaan metode *sampling* pada penelitian ini adalah *simple random sampling*, maka tidak ada suatu jamanan yang dapat memastikan apakah responden yang tidak diberikan literasi *big data analytics* benar-benar tidak paham atau sudah paham. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya memerlukan studi pendahuluan yang lebih mendalam.